

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD UNIVERSITY*
GOVERNANCE TERHADAP KEBERHASILAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
(Studi Kasus di Universitas Sebelas Maret Surakarta)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Disusun oleh:

SRI AGUSTINA

F0309085

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

*com***2013***user*

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE*

TERHADAP KEBERHASILAN PELAKSANAAN

ANGGARAN BERBASIS KINERJA

(Studi Kasus di Universitas Sebelas Maret Surakarta)



Surakarta, 01 Februari 2013

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing

Lulus Kurniasih, S.E., M.S., Ak.

NIP. 198005312005012015

commit to user

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi.



Surakarta, 27 Februari 2013

Tim Penguji Skripsi

Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak.

NIP. 196804011993032001

()
Ketua

Anas Wibawa, S.E., M. Si., Ak.

NIP. 1973021520001211001

()
Sekretaris

Lulus Kurniasih, S.E., M.S., Ak.

NIP. 198005312005012015

()
Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS EKONOMI

Jl.Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp (0271) 647481 Fax. (0271) 638143

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret:

Nama : SRI AGUSTINA
NIM. : F0309085
Jurusan : AKUNTANSI
Tempat / Tgl. Lahir : PATI, 10 AGUSTUS 1990
Alamat : JALAN PENJAWI NO. 535 KABORONGAN RT 11/01, PATI LOR-
59111. PATI
Pembimbing : LULUS KURNIASIH, S.E., M.S., AK.
Judul skripsi : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD UNIVERSITY*
GOVERNANCE TERHADAP KEBERHASILAN PELAKSANAAN
ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Studi Kasus di Universitas Sebelas
Maret Surakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya buat merupakan hasil karya murni saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari, bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan / salinan / saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sangsi:
 - a. Sebelum dinyatakan lulus, bersedia menyusun skripsi ulang dan diuji kembali
 - b. Setelah dinyatakan lulus, pencabutan gelar dan penarikan Ijazah kesarjanaannya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Surakarta, 01 Februari 2013
Mahasiswa yang menyatakan



SRI AGUSTINA
NIM. F0309085

HALAMAN MOTTO

"Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.
Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah
mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu"

(QS. Ath Thaalag: 3)

"Hendaknya kita mengukur ilmu bukan dari tumpukan buku yang kita baca, bukan dari tumpukan
naskah yang kita hasilkan,
bukan juga dari penatnya mulut dalam diskusi tak putus yang kita jalani,
tapi dari amal yang keluar di setiap desah nafas kita"

(Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)

"Hidup adalah soal keberanian menghadapi yang tanda tanya,
tanpa kita bisa mengerti tanpa kita bisa menawan, terimalah dan hadapilah"

(Soc Hoek Gie)

"SEMANGAT adalah kata yang selalu tertanam mengiringi setiap langkah perjuangan hidup dan
menjadi lentera yang tak pernah padam dalam naungan keikhlasan jiwa"

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Segores tinta perjuangan telah menorehkan serangkaian jejak kisah
atas hikmah dan hidayah dari Allah SWT
serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW,
teruntuk seluruh keajaiban di setiap perjuangan langkahku:*

*Bapakku tercinta yang selalu menginspirasi dari setiap langkah perjuangan hidupnya. Semoga beliau
tenang di sisi-Nya.*

Ibuku tercinta yang selalu berjuang dengan penuh kasih sayang demi yang terbaik bagi anak-anaknya.

*Kakakku dan adikku tercinta yang selalu mengerti, memperhatikan dan memberikan semangat untuk
terus berjuang.*

*Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang menemani, memotivasi dan senantiasa menginspirasi
hari-hariku.*

Dosen-dosenku yang luar biasa dan selalu membimbing dengan sepenuh hati.

Semoga karya ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Wisnu Untoro, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.
3. Sri Suranta, S.E., M.S., Ak. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama masa studi penulis.
4. Ibu Lulus Kurniasih, S.E., M. Si., Ak. selaku dosen pembimbing skripsi dan magang tercinta yang telah berkenan memberikan bimbingan dan ilmunya selama ini, penuh perhatian dan menjadi inspirasi luar biasa bagi penulis, selalu memberikan bantuan dan meluangkan waktu setiap saat. Terima kasih juga telah memberi kesempatan penulis menjadi asisten Ibu. Pengalaman berharga bersama Bu Lulus tak kan pernah saya lupakan, terima kasih Bu Lulus.

commit to user

5. Bu Anni, Bu Christ dan Pak Sri Suranta selaku penguji kompre yang luar biasa, membuka wacana dan membakar semangat penulis untuk terus belajar sampai kapanpun itu.
6. Terima kasih kepada para responden, seluruh ketua jurusan/prodi di UNS yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi perbaikan UNS ke depannya.
7. Seluruh dosen FE UNS yang telah memberikan ilmu bagi penulis. Pak Hanung, Pak Halim, Pak Hartoko, dan Pak Taryo, yang telah memberi tambahan bimbingan tim lomba. Farah dan Adhi, teman 1 tim yang kocak. Ika, Ferda, Sandra, Tika, Diah, Mbak Oca, Mbak Anes, Mbak Eva, Mbak Diesta yang juga telah berjuang bersama, serta Retnia dan Novita yang tak disangka takdir mempertemukan kita lagi di kota Solo ini dan kita juga berkesempatan berjuang bersama. Teruntuk adik-adik penerus, Farah, Tika, Diah, Riana, Haris, Laga, Caca, Beltian, dan Yoshia, tetap berjuang, kalian pasti bisa lebih baik. Mari berjuang mengharumkan nama UNS!!
8. Bu Retno Widowati guru tercinta yang telah banyak membantu penulis serta sangat berjasa hingga penulis mampu melanjutkan cita-cita dan terus berjuang demi masa depan.
9. Bapak tercinta, Pak Moch Tachrir ayah terbaik di dunia yang selalu menjaga dengan penuh kasih sayang, bahkan sampai di saat-saat terakhir pun beliau tetap memperhatikan dan menjaga perasaan penulis. Semoga engkau tenang di sisi-Nya. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan.

10. Ibu tercinta, Ibu Rumiya ibu terbaik di dunia, ibu paling tangguh, paling luar biasa, yang senantiasa mengerti, berjuang tanpa lelah, sabar, selalu tersenyum dan berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
11. Kakak dan adik penulis Agus Armanto dan Kukuh Aprilianto yang tersayang. Bangga punya kakak dan adik seperti kalian, saudara terbaik di dunia. Mari kita berjuang demi memuliakan kedua orangtua kita baik di dunia maupun akhirat, mari buat Bapak dan Ibu bangga...SEMANGAT!!!
12. Sahabat-sahabat kecil penulis Malfrea, terima kasih atas persahabatan kita. Briyan semoga cepat jadi dokter yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa, terima kasih kau yang selama ini sudah banyak penulis repotkan. Ayo bisnis kita 'CherryBee' Craft kita kembangkan lagi. Eva dan Evi si kembar yang tak terpisahkan, Fitria, Dana, Ica dan Kris makasi ya Malf.
13. Terkhusus sahabat seperjuangan dalam penelitian skripsi ini Yeni Wulandari dan Sari Nugraeni, yang telah berjuang bersama dari awal sampai akhir. Berjuang bernyasar-nyasar ria di berbagai sudut UNS demi menyebar kuesioner. Setiap hari kita perjuangkan walau hujan dan panas menerjang. Berjalan kaki seharian, setiap kisah kita lalui bersama, setiap jejak kita tinggalkan di fakultas-fakultas yang telah kita kelilingi, kita ketuk setiap pintu demi mendapat sebuah jawaban. Perjuangan yang selalu dibalut kisah unik dan membuat kita tertawa bersama. Tak kan terlupakan...ABK Lovers....SEMANGAT!!!
14. Teman-teman PARESMAPA yang telah mengajarkan arti kehidupan, ayo naik gunung lagi, kangen muncak dengan kalian. PARESMAPA JAYA!!!
commit to user

15. Tim PKM *SMart Accounting System*, Lifta, Dina, Beltian dan Galih, SEMANGAT-SEMANGAT mari kita selesaikan proyek kita... ☺
16. HMJ Akuntansi FE UNS, teman-teman pengurus dan keluarga besar HMJA. Terima kasih atas semua pengalaman yang diberikan, teman-teman presidium periode 2011 yang telah berjuang bersama, Irma, Yenny, Ferda, Harun, Gie, Gepeng, dan Lani. *Who is the Best??Accounting Society!!*
17. Teman-teman PL CREW periode 2011 yang selalu penuh kreativitas Bieber, Alifta, Vian, Endah, Jayko, Rani, Fidsa, Fanny, dan Mas Adrian juga teman-teman magangers PL CREW periode 2011 yang ikut membantu Annisa, Nisa, Estetika, Dhepe, Mayang, Kiky, Meitia, Fahri, Luthfi, dan Nanda. SEMANGAT!!!
18. Teman-teman, pengurus dan keluarga besar KEI FE UNS, yang senantiasa memberi wacana luar biasa. Teman-teman RnD KEI serta teman-teman seperjuangan TEMILREG, serta teman seperjuangan TEMILNAS Ami dan Sandra yang telah terbang dan mengapung bersama di Kalimantan. Ekonomi Islam..Subhanallah!!
19. Teman-teman pengurus dan alumni BEM FE UNS yang telah memberi pengalaman bagi penulis selama ini. HIDUP MAHASISWA!!!
20. Teman-teman asistensi PAK2, AKM1, AKM2 dan Praktik SIA yang selama ini selalu semangat belajar dan menginspirasi. Senang bisa berbagi ilmu dan belajar bersama. Belajar dengan kalian sungguh pengalaman yang sangat berharga. Ayo belajar bareng lagi. Kalau kalian mau diskusi

atau ada yang ditanyakan, dengan senang hati masih siap membantu.

SEMANGAT!!SEMOGA SUKSES!! ☺

21. Sahabat dan teman penulis, Nandhya dan Maya kangen main bareng lagi. Galih Utami tetap SEMANGAT!! Makasi sudah menemani magang. Dek Lely makasi sudah banyak berbagi cerita. Ulva dan Vika makasi sudah mengantarkan waktu kompre. Widhi, Fifi, dan Lia, tetap SEMANGAT belajar ya. Laila, Mifta dan Novi yang sudah naik rakit bersama sewaktu membuat film dokumenter di Bengawan Solo. Edwin, Prihanto dan Reni tengkyu bos.
22. Si putih, sepeda pinjaman dari Vian yang selalu menemani penulis mengayuh masa depan dan bernyasar-nyasar ria. Makasi Vian sudah meminjamkan Si Putih.
23. Teman-teman Kost Annisa angkatan pertama, Mbak Sari, Mbak Puji', Mbak Melz, Mbak Yola, Mbak Ninik, Mbak Dinda, Mbak Uji', Mbak Eka dan teman sekamarku Nia. Teman-teman Kost Annisa angkatan terakhir, Destika, Ika, Pita, Weni, Putri, Wilda, dan Nayla yang telah menampung kembali di kost tercinta.
24. Teman-teman Kost Sekartaji IV, kost baru penulis yang telah menampung ketika Kost Annisa dijual. Destika dan Ika yang telah menemani pindah di kost baru, Mbak Tri, Mbak Ukhti, Sofi, Reylin, Novita, dan Nene yang telah menyambut dengan hangat di kost baru.
25. Teman-teman akuntansi FE UNS angkatan 2009, Dea, Gita, Afee, Jihan, Shilvi, Jessica, Rachel, Nadia, Rhevi, Mega, Rizka, Ratna, Plue, Haifa,

commit to user

Ian, Nana, Dyah Cipta, Erin, Julia, Liana, Marlina, Meity, Monica, Monika, Nabila, Nimas, Nindy, Nita, Ica, Noviana, Novika, Rosa, Revina, Lastry, Kiki, Puti, Ovie, Andri, Tomy, Ardan, Adit, Taufiq, Vito, Jokowi, Hendro, Mahe, Adnan, Lucky, Fathur, Danu, Aldhi, Rifqi, Fajar, Galih Gilang, Jalu, Arrozi, Hananto, Hakim, Wichandra, Wiema, Wahyu Pribadi, Wahyu Prasetyo, Randi, Leo, Luhung, Raymundo, rekan-rekan angkatan 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 dan seluruh almamater akuntansi FE UNS yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

26. Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi para pembaca.

Surakarta, Desember 2012

Sri Agustina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Konsep <i>Governance</i>	9

commit to user

2. Konsep Anggaran.....	14
3. Hubungan Implementasi <i>Good University Governance</i> dan Anggaran Berbasis Kinerja.....	21
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Pengembangan Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Desain Penelitian.....	31
B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	31
C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data	33
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	33
E. Metode Analisis Data	40
1. Analisis Deskriptif.....	40
2. Uji Instrumen Penelitian	40
3. Uji Asumsi Klasik.....	42
4. Uji Hipotesis	44
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Universitas Sebelas Maret	48
1. Sejarah UNS.....	48
2. Tugas, Visi dan Misi UNS	49
B. Analisis Deskriptif.....	50
1. Deskripsi Data.....	50
2. Deskripsi Persepsi Responden	54
C. Uji Instrumen Penelitian.....	64

commit to user

1. Uji Validitas	64
2. Uji Reliabilitas	65
D. Uji Asumsi Klasik	66
1. Uji Normalitas.....	66
2. Uji Multikolinearitas.....	67
3. Uji Autokorelasi.....	68
4. Uji Heterokedastisitas	69
E. Uji Hipotesis	70
1. Uji Koefisien Determinasi	70
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	71
3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	72
F. Pembahasan	73
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Keterbatasan	81
C. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Klasifikasi Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	42
Tabel III. 2 Kriteria Pengujian Autokorelasi	43
Tabel IV. 1 Sampel dan Pengembalian Kuesioner	52
Tabel IV. 2 Jenis Kelamin Responden	53
Tabel IV. 3 Usia Responden	53
Tabel IV. 4 Pendidikan Terakhir Responden	54
Tabel IV. 5 Persepsi Responden mengenai Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja	56
Tabel IV. 6 Persepsi Responden mengenai Peraturan dan Kualitas Peraturan	58
Tabel IV.7 Persepsi Responden mengenai Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi	60
Tabel IV. 8 Persepsi Responden mengenai Kompetensi Teknis dan Manajerial Pegawai	61
Tabel IV. 9 Persepsi Responden mengenai Kapasitas Organisasi	62
Tabel IV. 10 Persepsi Responden mengenai Teknologi Informasi	63
Tabel IV. 11 Hasil Uji Validitas Kuesioner	64
Tabel IV. 12 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner	65
Tabel IV. 13 Hasil Uji Normalitas	67
Tabel IV. 14 Hasil Uji Multikolineritas	67
Tabel IV. 15 Hasil Uji Autokorelasi	68
Tabel IV. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi	70

commit to user

Tabel IV. 17 Hasil Uji F.....	71
Tabel IV. 18 Hasil Uji t.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar IV. 1 <i>Scatterplot</i> Uji Heterokedastisitas.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sampel Penelitian

Lampiran 2. Daftar Jurusan dan Program Studi S1 di UNS

Lampiran 3. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Lampiran 4. Kuesioner Penelitian

Lampiran 5. Jawaban Responden Penelitian

Lampiran 6. Output SPSS



ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE*
TERHADAP KEBERHASILAN PELAKSANAAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA
(Studi Kasus di Universitas Sebelas Maret Surakarta)**

SRI AGUSTINA

NIM. F0309085

Isu *good governance* menjadi perhatian utama dalam reformasi anggaran di sektor publik, tak terkecuali institusi publik berupa universitas juga dituntut untuk menerapkan *good university governance* dalam pengelolaan keuangannya. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good university governance* terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Prinsip-prinsip *good university governance* yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan dan kualitas peraturan; akuntabilitas, transparansi dan partisipasi; kompetensi teknis dan manajerial pegawai; kapasitas organisasi; dan teknologi informasi

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui instrumen kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan sampel penelitian 50 ketua jurusan atau prodi di UNS. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif untuk mengetahui deskripsi tentang responden penelitian dan persepsi responden terhadap variabel yang diteliti. Uji validitas dan reliabilitas juga digunakan untuk menguji instrumen penelitian. Selanjutnya, uji regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa prinsip *good university governance* yaitu teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Sedangkan untuk ke empat prinsip lainnya yaitu peraturan dan kualitas peraturan; akuntabilitas, transparansi dan partisipasi; kemampuan teknis dan manajerial pegawai; dan kapasitas organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Keywords: *Good University Governance*, anggaran berbasis kinerja

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF GOOD UNIVERSITY
GOVERNANCE ON SUCCESS OF PERFORMANCE BASED BUDGETING
(Case Study at the Sebelas Maret University Surakarta)**

SRI AGUSTINA

NIM. F0309085

The issue of good governance is a major concern in the budget reform in the public sector, with no exception to the public institutions such as universities are also required to implement a good university governance in financial management. This study aims to empirically examine the effect of the application of the principles of good university governance to the successful implementation of performance-based budgeting at Sebelas Maret University Surakarta. The principles of good university governance used in this study consists of the rules of law and regulations quality; accountability, transparency and participation; technical and managerial competence of civil servants; organizational capacity, and information technology

This research was conducted with a survey method through the questionnaire instrument. This study used purposive sampling techniques, with samples of 50 department heads at UNS. The method of analysis used includes descriptive analysis to find a description of the survey respondents and respondents' perceptions of the variables studied. Validity and reliability are also used to test the research instruments. Furthermore, regression testing is used to test the hypothesis in this study.

The results of this study found that the principles of good university governance namely information technology have significant positive effect on the successful implementation of performance-based budgeting. While the other four principles, some of which are the rules of law and regulations quality; accountability, transparency and participation; technical and managerial competence of civil servants; organizational capacity do not significantly influence the successful implementation of performance-based budgeting.

Keywords: *Good University Governance, performance-based budgeting.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu *good governance* di sektor publik menjadi titik kritis dalam pengelolaan keuangan publik. Selama ini penerapan *governance* di Indonesia masih belum sesuai harapan. Berdasarkan hasil penelitian indeks implementasi *governance* yang dilakukan oleh Kaufmann *et al.* (2010), menunjukkan bahwa masih buruknya implementasi *governance* di Indonesia selama jangka waktu 1996-2009. Hampir semua komponen indikator menunjukkan nilai perolehan Indonesia berada pada angka negatif. Selain itu, Indonesia termasuk pada kategori negara menengah bawah dari sekitar 200 lebih negara yang disurvei. Berbagai permasalahan dan lemahnya pengelolaan keuangan publik mengindikasikan perlunya perbaikan dalam tata pemerintahan organisasi sektor publik. Pada prinsipnya *good governance* berorientasi pada penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Di tengah gencarnya penerapan *good governance* sebagai landasan nilai penyelenggaraan tata kelola di sektor publik, muncul paradigma *Good University Governance (GUG)* yang menjadi sebuah tuntutan yang harus diterapkan di perguruan tinggi. Hal tersebut didasari oleh keberadaan perguruan tinggi sebagai pusat intelektual dan organisasi penyedia layanan publik berupa pendidikan. Tuntutan penataan diri perguruan tinggi melalui

commit to user

implementasi prinsip-prinsip *good university governance* akan menjadi salah satu kunci pokok bagi pengembangan perguruan tinggi sebagai agen pencetak generasi penerus bangsa. Pada dasarnya menurut OECD prinsip-prinsip *good governance* antara lain dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) peraturan dan kualitas peraturan; 2) akuntabilitas, transparansi dan partisipasi; 3) kompetensi teknis dan manajerial pegawai; 4) kapasitas organisasi; dan 5) teknologi informasi (Liou, 2007). Prinsip-prinsip tersebut juga hendaknya diterapkan di lingkungan perguruan tinggi untuk menciptakan tata kelola yang baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai perguruan tinggi.

Reformasi anggaran di sektor publik juga menjadi bagian penting dalam dinamika *good governance*. Dalam rangka menciptakan *good university governance* yang utuh, perlu diselaraskan dengan keberhasilan reformasi anggaran. Untuk mendukung terwujudnya *good university governance* maka pengelolaan keuangan publik harus diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel. Wujud dari pengelolaan keuangan publik adalah melalui anggaran. Anggaran merupakan alat akuntabilitas manajemen dan kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (Juliani, 2010).

Seiring dengan reformasi anggaran, telah muncul penerapan anggaran berbasis kinerja bagi sektor publik, tak terkecuali di perguruan tinggi. Anggaran berbasis kinerja merupakan titik tolak dalam perkembangan pengelolaan keuangan di sektor publik yang didasarkan pada tujuan dan

sasaran kinerja. Anggaran berbasis kinerja menjadi pokok perhatian dalam meningkatkan proses penganggaran dan efisiensi program agar mencapai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik (Robinson dan Last, 2009).

Penelitian terkait dengan *good governance* dan anggaran berbasis kinerja masih sangat jarang ditemui. Mayoritas penelitian mengenai anggaran berbasis kinerja selama ini hanya berupa penelitian deskriptif, seperti penelitian yang dilakukan Durachman (2005), yang meneliti mengenai mekanisme penyusunan anggaran berbasis kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Hasil penelitian deskriptif ini menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran berbasis kinerja di Dinas Kesehatan Jambi masih bersifat parsial dan belum sesuai dengan konsep anggaran berbasis kinerja yang semestinya. Sedangkan Cipta (2011), melakukan penelitian mengenai penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) pada pemerintah daerah ditinjau dari persyaratan penetapan dan penggunaan indikator kinerja dalam proses penyusunan anggaran dan faktor-faktor penyebab belum berjalannya penganggaran berbasis kinerja tersebut. Selain itu, beberapa penelitian empiris (kuantitatif) juga pernah dilakukan oleh Arti (2009) yang menguji pengaruh konsep *value for money* pada anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas. Sedangkan penelitian Habiburrochman dan Rizki (2012) menguji variabel anggaran berbasis kinerja dengan efektivitas pengendalian, yang terdiri dari pengendalian kinerja dan pengendalian keuangan.

Sejauh ini belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai *Good University Governance (GUG)* dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini merujuk pada penelitian Sriharioto dan Wardhani (2012) yang menguji pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan kompetensi KPPN terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di enam provinsi di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sriharioto dan Wardhani (2012) adalah terkait dengan variabel prinsip-prinsip *good governance* yang tidak dimoderasi dengan kompetensi KPPN karena penelitian ini hanya dilakukan pada satker tunggal sehingga disesuaikan dengan obyek penelitian yang dituju yaitu di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) merupakan salah satu instansi perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan layanan umum berupa pendidikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 52 tahun 2009, pada tanggal 26 Februari 2009 Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) resmi berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Sebagai sebuah institusi publik yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka UNS harus menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangannya. Dengan demikian, UNS menjadi obyek yang menarik untuk diteliti terkait dengan penerapan anggaran berbasis kinerja. Hal yang mendasar agar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dapat berhasil adalah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip *Good University*
commit to user

Governance (GUG). Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian “Implementasi Prinsip-Prinsip Good University Governance terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus di Universitas Sebelas Maret Surakarta)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah peraturan dan kualitas peraturan (*the rule of law and regulation quality*) memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja?
2. Apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi (*accountability, transparency and participation*) memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja?
3. Apakah kompetensi teknis dan manajerial pegawai (*technical and managerial competence of civil servants*) memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja?
4. Apakah kapasitas organisasi (*organizational capacity*) memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja?
5. Apakah teknologi informasi (*information technology*) memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait adanya pengaruh antara peraturan dan kualitas peraturan (*the rule of law and regulation quality*) terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait adanya pengaruh antara akuntabilitas, transparansi dan partisipasi (*accountability, transparency and participation*) terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait adanya pengaruh antara kompetensi teknis dan manajerial pegawai (*technical and managerial competence of civil servants*) terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
4. Untuk memperoleh bukti empiris terkait adanya pengaruh antara kapasitas organisasi (*organizational capacity*) terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
5. Untuk memperoleh bukti empiris terkait adanya pengaruh antara teknologi informasi (*information technology*) terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, gambaran dan bukti-bukti empiris mengenai penerapan prinsip-prinsip *good university governace* terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti yang melaksanakan penelitian-penelitian sejenis dan penelitian-penelitian lanjutan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi dasar dalam upaya meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good university governace* terutama terkait dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab.

Masing-masing bab secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang memuat uraian mengenai alasan dan motivasi untuk melakukan penelitian, perumusan masalah yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis penelitian serta keterkaitan variabel-variabel dalam penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil pengolahan data melalui instrumen penelitian yang digunakan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan yang terdapat dalam penelitian serta rekomendasi yang diberikan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep *Governance*

Konsep *governance* semakin populer seiring dengan dinamika sosial politik yang membutuhkan perubahan atas peran pemerintah yang selama ini menjadi titik tumpu utama dalam setiap kebijakan publik. Bonnafous (2005) mengemukakan munculnya konsep *governance* didasari oleh adanya pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan dari *government* ke arah *governance*. *Government* cenderung lebih mengedepankan pemerintah sebagai aktor utama yang berperan di berbagai kebijakan publik. Apabila hal tersebut diteruskan tanpa ada keseimbangan dan pengawasan oleh elemen-elemen lainnya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Sedangkan *governance* lebih memfokuskan adanya sinergisitas antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut telah mengubah cara pandang publik terhadap tata kelola pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Sudana dan Sukasih, 2006).

Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS (2007) mengemukakan bahwa konsep *governance* idealnya harus bertumpu pada keseimbangan antara tiga komponen utama, *commit to user*

yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari dominasi kekuasaan atas satu komponen terhadap komponen lainnya. Melalui perwujudan *governance* maka setiap komponen akan memegang peranan penting dan secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

a. Konsep *Good Governance*

Konsep *good governance* merujuk pada tata pemerintahan yang baik dan merupakan perwujudan dari konsep *governance*. *Good governance* merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan publik. Menurut KNKG (2010), implementasi *good governance* dipercaya dapat memberikan kontribusi strategis dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan daya saing, serta efektif dalam pencegahan terhadap tindak korupsi.

Pengertian *good governance* pada dasarnya merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik melalui pemerintahan yang baik. Menurut *World Bank* dalam (Mardiasmo, 2002:18), *good governance* diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pencegahan korupsi dengan menjalankan disiplin anggaran. *Good governance* dapat dipandang sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sebagai *agent of development*. *Agent of development*

diartikan sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat melalui berbagai kebijakan termasuk anggaran (Tjokroamidjojo, 2000). Pada prinsipnya *good governance* merujuk pada cara kekuasaan dan wewenang itu dikelola dan digunakan untuk merespon masalah-masalah publik dengan mengikuti prinsip atas nilai tertentu yang dinilai baik oleh masyarakat (Endarti, 2005).

b. Konsep *Good University Governance*

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, konsep *good university governance* menjadi sebuah tuntutan yang harus dilaksanakan seiring dengan maraknya penerapan konsep tata pemerintahan yang baik, yaitu *good governance*. Pada dasarnya, konsep *good university governance* hampir sama dengan konsep *good governance* pada umumnya. Akan tetapi, yang membedakan penerapan *good governance* di lingkungan universitas dengan di sebuah negara atau perusahaan adalah terkait dengan nilai-nilai luhur pendidikan yang harus tetap dijunjung tinggi dalam penerapannya.

Secara sederhana, *good university governance* merupakan penerapan konsep dasar *good governance* dalam sistem dan proses *governance* pada perguruan tinggi melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum. *Good university governance* diperlukan untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan-

peraturan yang berlaku di perguruan tinggi. Penerapan *good university governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha (perguruan tinggi) sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa pendidikan di perguruan tinggi (Muhi, 2010).

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam ranah kompetisi di dunia pendidikan, perguruan tinggi mulai berlomba-lomba untuk maju dan berupaya meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Antusiasme di kalangan perguruan tinggi untuk terus berkembang diwarnai oleh tuntutan atas administrasi yang mampu mendukung kelancaran tugas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kemampuan perguruan tinggi dengan mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance* (Margono, 2005). *Good university governance* ini akan membawa tatanan pada perguruan tinggi menjadi selaras dan terarah pada pencapaian tujuan dari perguruan tinggi tersebut, sehingga akhirnya mampu memegang peran utama dalam penerapan *good governance* di ranah pendidikan.

c. Prinsip-Prinsip *Good University Governance*

Semakin krusialnya penerapan *good governance* di berbagai sektor termasuk perguruan tinggi, menuntut adanya penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang konsisten dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip *good university governance* merupakan suatu landasan yang

harus dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam pengelolaan perguruan tinggi agar mampu mengembangkan kapabilitasnya (Margono, 2005). Pada dasarnya prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan dalam tata kelola suatu organisasi. Adapun menurut OECD inti pokok dari prinsip-prinsip *good governance* (Liou, 2007) antara lain dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Peraturan dan kualitas peraturan. Dalam proses kebijakan publik termasuk penganggaran harus dilakukan sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap peraturan harus memiliki kualitas yang memadai dan mudah dimengerti agar pelaksanaan peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik.
- 2) Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Unsur penting yang hendaknya saling bersinergi satu sama lain adalah terkait dengan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaporan hendaknya dilakukan secara terbuka, melibatkan semua aspirasi pihak terkait dan dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.
- 3) Kompetensi teknis dan manajerial pegawai. Agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan visi misi, maka komponen yang menjadi titik krusial adalah sumber daya manusia dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Pegawai harus memiliki

commit to user

kemampuan teknis dan manajerial yang memadai agar mampu melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya.

- 4) Kapasitas organisasi. Untuk mencapai tata kelola yang baik, hendaknya kapasitas organisasi yang dinilai dari keberadaan struktur organisasi dan sistem manajerial harus mendukung.
- 5) Teknologi informasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola suatu organisasi yang komprehensif, maka diperlukan penggunaan teknologi informasi yang memadai untuk mempermudah dalam pelaksanaan kinerja.

Prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasi dalam penerapan *good university governance* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pendidikan, sehingga pengelolaan perguruan tinggi menjadi lebih baik, terutama jika ditinjau dari aspek penganggaran.

2. Konsep Anggaran

Menurut Govindarajan dan Anthony (2005:73) anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian yang efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Mulyadi (2001:488) mengungkapkan bahwa anggaran merupakan rencana kerja secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter dan mencakup jangka waktu satu periode. Anggaran direncanakan oleh manajemen dan membawa organisasi pada suatu kondisi yang diperhitungkan sebelumnya. Garison *et al.* (2007:626) menyatakan anggaran merupakan rencana terperinci dalam perolehan dan

commit to user

penggunaan sumber daya selama satu periode tertentu. Sedangkan dalam lingkup sektor publik, anggaran dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan mengenai biaya atau pengeluaran atas rencana yang dibuat dan cara untuk memperoleh pendanaan (pendapatan) atas rencana tersebut yang diukur secara moneter (Mardiasmo, 2002:62).

Anggaran memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Menurut Mardiasmo (2002:63) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain sebagai:

- a. Alat perencanaan, anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan, baik terkait mengenai tujuan atau sasaran kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, serta dana yang dibutuhkan untuk menjalankannya.
- b. Alat pengendalian, anggaran yang dipertanggungjawabkan kepada publik akan mengendalikan semua alokasi sumber daya dan membatasi kekuasaan eksekutif sehingga anggaran tidak salah sasaran (*misappropriation*).
- c. Alat kebijakan fiskal, anggaran dapat digunakan terkait dengan kebijakan fiskal, yakni dalam rangka menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- d. Alat politik, anggaran merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif terhadap penggunaan dana publik. Anggaran

commit to user

digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan atas prioritas tersebut.

- e. Alat koodinasi dan komunikasi, dalam proses penyusunan anggaran diperlukan mekanisme koordinasi dan komunikasi dari setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Anggaran dapat dikomunikasikan ke setiap satuan kerja untuk dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
- f. Alat penilai kinerja, anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kineja. Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
- g. Alat motivasi, anggaran dapat mendorong manajer maupun stafnya untuk melakukan tindakan yang ekonomis, efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.
- h. Alat untuk menciptakan ruang publik, dalam proses penganggaran harus melibatkan publik sebagai salah satu komponen penting, publik dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya untuk menciptakan suatu mekanisme pertanggungjawaban keuangan terhadap publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Konsep anggaran di sektor publik, selama ini telah banyak mengalami perkembangan, sehingga muncul dua pendekatan utama dalam penyusunan dan perencanaan anggaran publik, yaitu pendekatan anggaran tradisional dan pendekatan *New Publik Management*. Anggaran tradisional hanya menekankan pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang

terpusat serta tidak memiliki perhatian terhadap konsep *value for money*. Sedangkan pendekatan baru yaitu *New Public Management* lebih menekankan pada kinerja organisasi bukan sekedar kebijakan yang terkesan kaku, birokratis dan hierarkis (Mardiasmo, 2002:75). Salah satu teknik penganggaran publik yang menjadi bagian dari keberadaan pendekatan *New Public Management* adalah anggaran berbasis kinerja.

a. Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Mardiasmo (2002:20), untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Salah satu reformasi tersebut adalah terkait dengan reformasi sistem penganggaran. Seiring dengan reformasi anggaran, anggaran tradisional berbasis *line item* telah tergantikan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja ini diharapkan mampu mengurangi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada anggaran tradisional. Anggaran *line item* tradisional menyajikan pengeluaran-pengeluaran hanya berdasarkan *input* atau sumber daya yang digunakan. Karakteristik utama dari sistem *line item budget* adalah menetapkan batas atas *line item* pada proses alokasi anggaran dan menjamin bahwa unit kerja tidak melakukan pengeluaran melebihi batas tersebut, sehingga anggaran tersebut lebih bersifat rigid (Shah dan Shen, 2007). Berbeda dengan anggaran tradisional, anggaran berbasis kinerja tidak hanya sekedar berfokus pada *input* tetapi lebih memperhatikan

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Selain itu juga termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut sehingga prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dapat dicapai.

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan sistem penganggaran yang memiliki orientasi pada *output* organisasi dan berhubungan erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006:171). Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:84), anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja menyediakan informasi kinerja mengenai apa yang dilakukan oleh organisasi atau apa yang diharapkan dari organisasi tersebut dengan dana yang ada. Secara umum prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) dan prinsip *good governance*, termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sancoko *et al.*, 2008).

b. Pentingnya Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

Di Indonesia, implementasi sistem anggaran berbasis kinerja telah diamanahkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara yang menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja perlu dilakukan dalam upaya memperbaiki proses penganggaran. Berdasarkan peraturan tersebut, sudah menjadi keharusan anggaran berbasis kinerja untuk diterapkan di berbagai entitas sektor publik, termasuk juga perguruan tinggi yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU).

Anggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas, sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penerapan anggaran berbasis kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik tersebut.

Menurut Sancoko *et al.* (2008), penerapan anggaran berbasis kinerja dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Anggaran berbasis kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas sehingga tujuan dapat tercapai dengan efisien dan efektif.
- 2) Penerapan anggaran berbasis kinerja adalah hal penting untuk menuju pelaksanaan kegiatan dan program yang transparan. Dengan anggaran yang jelas, dan juga *output* yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan *output* yang hendak dicapai maka akan tercipta transparansi.

commit to user

- 3) Organisasi pembuat kebijakan akan berada pada posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang rasional.

Utomo *et al.* (2007) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja dipercaya memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat terutama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Implementasinya diharapkan akan meningkatkan proses pembangunan menjadi lebih efisien dan partisipatif, karena melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan pelayanan publik. Meninjau tujuan dan manfaat anggaran berbasis kinerja tersebut, maka implementasi anggaran berbasis kinerja penting untuk dilaksanakan terutama dengan berpedoman pada peraturan-peraturan terkait yang mewajibkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

c. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi sebagai sebuah institusi sektor publik yang menyediakan bentuk pelayanan publik berupa pendidikan juga diwajibkan mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja. Anggaran pendidikan pada lembaga penyelenggara pendidikan khususnya perguruan tinggi disusun dengan pendekatan kinerja, sehingga sistem penganggaran memfokuskan pada pencapaian hasil atau kinerja dari biaya aktivitas yang telah ditetapkan (Achdiat, 2010).

Berdasarkan penelitian Habiburrochman dan Rizki (2012) bahwa dengan adanya penerapan anggaran berbasis kinerja pada perguruan tinggi akan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian keuangan. Implementasi anggaran berbasis kinerja mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih mengutamakan kinerja dari perguruan tinggi, sehingga pengelolaan anggaran akan mengikuti kinerja yang diharapkan. Sedangkan Achdiat (2010) menyatakan bahwa dengan adanya implementasi anggaran berbasis kinerja akan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perguruan tinggi, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen.

Keunggulan implementasi anggaran berbasis kinerja dapat diperoleh terutama dengan mendorong perubahan arah pengambilan keputusan, termasuk pengawasan anggaran dari pengendalian masukan keuangan ke arah pengendalian hasil atau *outcomes*. Fokus pada hasil ini akan lebih mendorong upaya menciptakan *good governance*, karena tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali *input*, tetapi juga sebagai alat akuntabilitas publik.

3. Hubungan Implementasi *Good University Governance* dan Anggaran Berbasis Kinerja

Good university governance mempunyai keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Menurut BPKP (2005),
commit to user

penerapan anggaran berbasis kinerja dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan menurut Keban (2000), fokus utama *governance* adalah perbaikan kinerja atau perbaikan kualitas pelayanan kepada publik. Dengan demikian pada dasarnya, anggaran berbasis kinerja yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan di perguruan tinggi akan menjadi titik tolak utama dalam tercapainya *good university governance*.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip *good university governance*. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* merupakan perhatian utama dalam pelaksanaan anggaran (Widhianto, 2010). Sebagaimana yang dinyatakan Juliani (2010), anggaran merupakan alat manajemen dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Menurut Yamamoto (2010), penggunaan anggaran berbasis kinerja di perguruan tinggi sudah banyak diterapkan dalam skala global. Banyak negara yang sudah mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja di perguruan tinggi dengan mengupayakan pengelolaannya secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan pembahasan-pembahasan tersebut, dapat ditarik benang merah antara *good university governance* dengan anggaran berbasis kinerja.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai anggaran berbasis kinerja telah dilakukan, dan sebagian besar diantaranya berupa penelitian deskriptif seperti halnya yang dilakukan oleh Durachman (2005), yang meneliti mengenai mekanisme penyusunan anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja di Dinas Kesehatan Jambi masih bersifat parsial. Pelaksanaan proses penganggaran tersebut masih belum melibatkan partisipasi staf dan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan relatif rendah. Komponen alokasi dana yang dimiliki tidak mencerminkan prioritas program secara keseluruhan.

Widyantoro (2009) melakukan kajian fenomenologis penerapan anggaran berbasis kinerja dengan studi kasus di Universitas Diponegoro (UNDIP). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum penerapan anggaran berbasis kinerja di UNDIP belum berjalan secara ideal. Meskipun para pegawai dan pimpinan sudah memahami makna anggaran berbasis kinerja, tapi masih ditemukan beberapa kesalahan dalam tahapan proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan dari dokumen anggaran yang sudah dibuat, sedangkan dalam pelaporan hanya dibuat secara formalitas memenuhi administratif semata.

Cipta (2011), melakukan penelitian mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah ditinjau dari persyaratan penetapan

dan penggunaan indikator kinerja dalam proses penyusunan anggaran dan faktor-faktor penyebab belum berjalannya penganggaran berbasis kinerja tersebut. Dalam penelitian-penelitian tersebut diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan legislatif dan lemahnya data kinerja.

Beberapa penelitian empiris (kuantitatif) juga pernah dilakukan oleh Arti (2009) terkait penerapan anggaran berbasis kinerja yang dikaji berdasarkan variabel efisiensi, ekonomi dan efektivitas terhadap akuntabilitas. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa variabel efisien dan efektif berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Depok. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada variabel efisien memiliki pengaruh lebih signifikan terhadap akuntabilitas dibandingkan dengan variabel efektif. Sementara itu, penerapan anggaran berbasis kinerja pada variabel ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok. Sedangkan penelitian Habiburrochman dan Rizki (2012) yang menguji variabel anggaran berbasis kinerja dengan efektivitas pengendalian di Universitas Airlangga. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian keuangan di lingkungan Universitas Airlangga.

Selain penelitian-penelitian terkait dengan anggaran berbasis kinerja tersebut, juga ada beberapa penelitian-penelitian terkait dengan *good*
commit to user

governance yang menjadi tinjauan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Tambunan (2007) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap tingkat efektivitas kerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Toba Samosir. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat efektivitas kerja pegawai.

Vian (2010) melakukan penelitian tentang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja seiring dengan adanya reformasi anggaran pada sektor kesehatan di Lesotho. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan berupaya memahami tatanan rumah sakit di Lesotho dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat mendukung reformasi anggaran pada rumah sakit di Lesotho.

Widhiyanto (2010), melakukan penelitian normatif bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip *good governance* sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sejauh ini belum ada peraturan teknis yang mengatur khusus tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sriharioto dan Wardhani (2012) telah memberikan bukti empiris bahwa penerapan prinsip *good governance* aturan dan kualitas peraturan (*the rule of law and regulation quality*) dan teknologi informasi (*technology information*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja satker Kementerian/Lembaga. Di sisi lain, hasil penelitian ini ternyata tidak berhasil membuktikan pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti: 1) akuntabilitas, transparansi dan partisipasi (*accountability, transparency and participation*), 2) kompetensi teknis dan manajerial pegawai (*technical and managerial competence of civil servants*), dan 3) kapasitas organisasi (*organizational capacity*) terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja satker Kementerian/Lembaga.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Peraturan dan Kualitas Peraturan terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam konteks *good university governance*, perguruan tinggi memerlukan sebuah kerangka legal atau hukum dan peraturan yang ditegakkan secara komprehensif. Aturan-aturan itu dapat disusun dalam bidang akademik maupun non-akademik (Syukur, 2010). Reformasi peraturan perlu disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas peraturan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kinerja. Penelitian Sriharioto dan Wardhani (2012) membuktikan bahwa peraturan

dan kualitas peraturan berpengaruh positif terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₁: Peraturan dan kualitas peraturan memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

2. Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2002). Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Margono (2005), bahwa semua keputusan dan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* yang bersangkutan. Akuntabilitas menjadi sebuah keharusan yang perlu ditegakkan dalam otoritas sektor publik tak terkecuali di lingkup perguruan tinggi. Berdasarkan penelitian Melawati (2011) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja. Prinsip akuntabilitas juga harus diimbangi dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Menurut Margono (2005), transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diakses oleh *stakeholder* yang membutuhkan informasi tersebut. Sedangkan partisipasi mengacu bahwa seluruh *stakeholder* memiliki suara dalam

pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang sah mewakili kepentingannya. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₂: Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

3. Kompetensi Teknis dan Manajerial Pegawai terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Aspek utama dalam Badan Layanan Umum (BLU) adalah pelayanan. Universitas berstatus BLU memiliki kewajiban menyediakan pelayanan jasa pendidikan kepada masyarakat. Dalam penyediaan pelayanan tersebut hendaknya perlu adanya kompetensi teknis dan manajerial dari pegawai. Penelitian Melawati (2011) menemukan bahwa kapasitas aparatur yang terkait dengan kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₃: Kompetensi teknis dan manajerial pegawai memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

4. Kapasitas Organisasi terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Kapasitas manajemen (organisasi) menggambarkan bagaimana mengelola ketiga bidang, yaitu keuangan, sumber daya manusia dan informasi (Muhammad, 2008). Struktur organisasi merupakan salah satu

elemen dalam kapasitas organisasi. Berdasarkan penelitian Suaib (2008) struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₄: Kapasitas organisasi memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

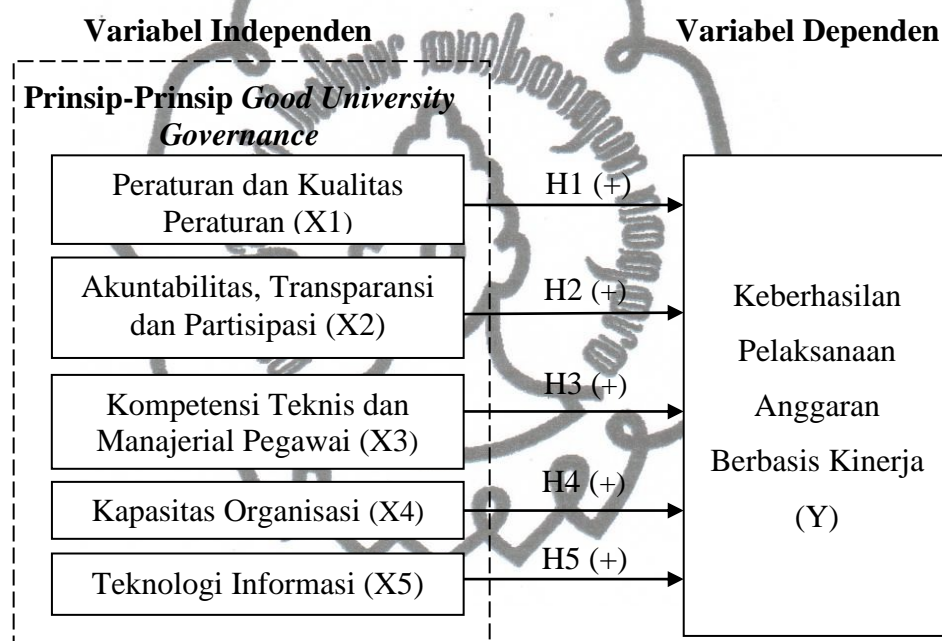
5. Teknologi Informasi terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Teknologi informasi semakin berkembang dalam tataran global. Pemanfaatan teknologi informasi telah dikembangkan di berbagai bidang. Penggunaan teknologi Informasi dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah (Manalu, 2010). Penelitian Sriharioto dan Wardhani (2012) membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₅: Teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Prinsip-prinsip *good university governance* merupakan hal-hal mendasar yang harus diterapkan terkait dengan pencapaian *good university governance*. Dalam hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Implementasi *good university governance* menurut Syukur (2010), dapat meningkatkan kinerja universitas. Melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan

efisiensi operasional universitas serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah penelitian lanjut untuk menguji apakah implementasi prinsip-prinsip *good university governance* memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Model dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa model penelitian ini terjadi secara satu arah untuk menjelaskan pengaruh implementasi prinsip-prinsip *good university governance* terhadap keberhasilan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Kelima variabel independen mengenai prinsip-prinsip *good university governance* tersebut dihipotesiskan memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana kerja yang terstruktur terkait dengan hubungan-hubungan antar variabel yang disusun secara komprehensif, perencanaan atas pengumpulan, pengukuran dan analisis data penelitian (Umar, 2008:4). Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yang menjelaskan sifat dari hubungan tertentu, memahami perbedaan antara kelompok atau independensi dua variabel atau lebih (Sekaran dan Bougie, 2010:108). Dalam penelitian ini menguji pengaruh antara prinsip-prinsip *good university governance* yang meliputi peraturan dan kualitas peraturan; akuntabilitas, transparansi dan partisipasi; kemampuan manajerial dan teknis pegawai; kapasitas organisasi; dan teknologi informasi terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) karena didasarkan pada pertimbangan bahwa sejak tanggal 26 Februari 2009 UNS telah resmi berstatus Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 52 tahun 2009. Dengan demikian

semenjak itu pula UNS telah memulai proses pengembangan sistem anggaran BLU yakni anggaran berbasis kinerja.

Menurut Sekaran dan Bougie (2010:262), populasi merupakan keseluruhan kondisi atau sesuatu yang menarik untuk diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti secara lebih mendalam (Sekaran dan Bougie, 2010:263). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sekaran dan Bougie, 2010:276). Sampel penelitian ini adalah Ketua Jurusan/Prodi S1 di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pertimbangan peneliti menggunakan sampel ini adalah terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good university governance* yang secara nyata harus diterapkan oleh masing-masing jurusan atau prodi sebagai elemen-elemen penting dari suatu kesatuan universitas di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Masing-masing jurusan atau prodi tersebut dipimpin oleh ketua jurusan atau ketua prodi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab agar prinsip-prinsip *good university governance* tersebut mampu diterapkan terutama terkait dengan keberhasilan pelaksanaan anggaran. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi pokok dari ketua jurusan/prodi adalah menyusun rencana program kegiatan dan anggaran tingkat jurusan/program studi sebagai bagian tak terpisahkan dari implementasi anggaran di universitas.

C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber penelitian (Umar, 2003:60). Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode survei dengan media kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu instrumen penelitian yang berisi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden penelitian. Kuesioner dibuat sebagai alat pengumpulan data yang akan diolah untuk menghasilkan informasi dalam penelitian (Umar, 2003:71). Kuesioner ini disebar kepada responden kemudian memberi waktu responden untuk mengisi dan mengumpulkannya kembali. Jenis kuesioner yang dipakai adalah kuesioner tertutup. Menurut Sekaran dan Bougie (2010:200), kuesioner tertutup menyajikan sejumlah pertanyaan yang jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Data primer dari kuesioner merupakan persepsi dari responden mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dimensi waktu *cross-sectional* karena data hanya sekali diambil pada suatu waktu tertentu (Sekaran dan Bougie, 2010:119). Data dalam penelitian ini diambil pada tahun penelitian 2012.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel merupakan suatu yang memiliki nilai yang dapat berbeda atau berubah (Sekaran dan Bougie, 2010:69). Penelitian ini menggunakan dua variabel utama yaitu, variabel dependen dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis *commit to user*

kinerja, sedangkan variabel independennya adalah prinsip-prinsip *good university governance*. Masing-masing variabel akan diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner yang didasarkan pada instrumen kuesioner penelitian sebelumnya dan juga disesuaikan dengan obyek penelitian. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert enam poin yang biasa digunakan dalam penelitian terdahulu. Adapun definisi variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah implementasi prinsip-prinsip *good university governance*. Menurut BAN PT (2011), implementasi prinsip-prinsip *good university governance* merupakan penerapan suatu sistem pengelolaan institusi perguruan tinggi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai kunci penting bagi keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Perguruan tinggi harus secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip *governance* terutama yang terkait dengan pelaku *governance* dan sistem *good university governance*. Implementasi prinsip-prinsip *good university governance* diproksikan dengan peraturan dan kualitas peraturan; akuntabilitas, transparansi dan partisipasi; kemampuan teknis dan manajerial pegawai; kapasitas organisasi; dan teknologi informasi.

a. Peraturan dan Kualitas Peraturan (*The Rule of Law and Regulation Quality*)

Perguruan tinggi dapat mempunyai program-program tertentu yang dianggap penting untuk menciptakan suatu tata pamong yang baik sesuai dengan peraturan (BAN PT, 2011). Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik BAPPENAS (2007), peraturan dan kualitas peraturan mencakup upaya pembentukan peraturan yang dilakukan dengan prosedur yang terbuka, jelas dan mudah dipahami demi terwujudnya *good governance*. Peraturan dan kualitas peraturan merupakan salah satu prinsip dasar *good university governance* yang dapat ditinjau dengan beberapa indikator, yaitu kemudahan pemahaman peraturan terkait dengan anggaran, mekanisme *reward and punishment* dan kemudahan implementasi prosedur operasional anggaran (Sriharioto dan Wardhani, 2012).

Instrumen kuesioner skala likert enam poin (dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju) dengan tiga item pernyataan digunakan untuk mengukur variabel peraturan dan kualitas peraturan. Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan penelitian Sriharioto dan Wardhani (2012) yang telah dikembangkan mengacu pada dimensi *resource*, *procedural*, dan *incentives* yang digunakan dalam penelitian Vian (2010). Para responden dihadapkan pada pernyataan mengenai persepsi mereka

terhadap peraturan dan kualitas dari peraturan tersebut dalam pelaksanaan anggaran.

b. Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi (*Accountability, Transparency and Participation*)

Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS (2007), akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja yang sejalan dengan kebijakan anggaran berbasis kinerja. Prinsip akuntabilitas harus dijalankan seiring dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Kebutuhan transparansi merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan atas pengelolaan sumber daya publik. Selain itu diperlukan prinsip partisipasi yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (Mardiasmo, 2006).

Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dapat ditinjau dengan beberapa indikator, yaitu sosialisasi anggaran, pengawasan anggaran, partisipasi pengawasan oleh masyarakat, keberadaan audit eksternal, mekanisme pelaporan dan ketepatan pelaporan realisasi anggaran (Sriharioto dan Wardhani, 2012). Instrumen kuesioner skala likert enam poin (dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju) dengan enam item pernyataan digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan penelitian Sriharioto dan Wardhani (2012) yang telah dikembangkan

mengacu pada partisipasi atau kritik publik dan saran perbaikan yang digunakan dalam penelitian Vigoda dan Yuval (2003). Para responden dihadapkan pada pernyataan mengenai berbagai hal terkait dengan variabel ini mulai dari sosialisasi, penyusunan, sampai pada pengawasan dan pemeriksaan anggaran.

c. Kemampuan Teknis dan Manajerial Pegawai (*Technical and Managerial Competence of Civil Servants*)

Keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pegawai. Menurut Safarudin (2010), kompetensi pegawai merupakan tingkat kemampuan seseorang untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya secara efektif efisien. Kemampuan teknis dan manajerial pegawai dapat ditinjau dengan beberapa indikator, yaitu pendidikan dan keahlian, insentif atas prestasi, penjelasan atas *job description*, komitmen pimpinan, kebanggaan menjadi bagian pelaksana anggaran, serta kebermanfaatan visi misi (Sriharioto dan Wardhani, 2012).

Instrumen kuesioner skala likert enam poin (dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju) dengan enam item pernyataan digunakan untuk mengukur variabel kemampuan teknis dan manajerial pegawai. Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan penelitian Sriharioto dan Wardhani (2012) yang telah dikembangkan mengacu pada dimensi artikulasi dan komunikasi visi misi serta motivasi karyawan dalam penelitian Vian (2010). Para responden dihadapkan pada pernyataan

terkait dengan kemampuan mereka selama ini sebagai bagian dari elemen penting dalam unit penganggaran di universitas.

d. Kapasitas Organisasi (*Organizational Capacity*)

Kapasitas organisasi merupakan kemampuan individu dan organisasi atau bagian organisasi untuk dapat berfungsi secara efektif, efisien dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi (Yuswijaya, 2008). Kapasitas organisasi dapat ditinjau dengan beberapa indikator, yaitu struktur organisasi yang mendukung, prioritas program kerja sebagai dasar pagu anggaran, kinerja pimpinan, pimpinan dapat membangun kebersamaan antar pegawai, serta pimpinan memberi kesempatan peningkatan kemampuan intelektual pegawai (Sriharioto dan Warhani, 2012).

Instrumen kuesioner skala likert enam poin (dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju) dengan lima item pernyataan digunakan untuk mengukur variabel kapasitas organisasi. Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan penelitian Sriharioto dan Wardhani (2012) yang telah dikembangkan mengacu pada dimensi motivasi karyawan untuk mengambil tindakan, menciptakan ekspektasi, menilai tanggung jawab dan kesempatan intelektual pegawai dalam penelitian Vian (2010). Para responden dihadapkan pada pernyataan terkait dengan struktur organisasi dan sistem manajerial yang mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di UNS.

e. Teknologi Informasi (*Information Technology*)

Teknologi informasi merupakan pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam mengolah informasi (Nugraha, 2003). Teknologi informasi dapat ditinjau dengan beberapa indikator, yaitu perubahan teknologi informasi terkait anggaran, penggunaan aplikasi dalam anggaran, dan kemudahan teknologi informasi dalam pelaporan (Sriharioto dan Wardhani, 2012). Instrumen kuesioner skala likert enam poin (dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju) dengan tiga item pernyataan digunakan untuk mengukur variabel teknologi informasi. Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan penelitian Sriharioto dan Wardhani (2012) yang telah dikembangkan mengacu pada penelitian Vigoda dan Yuval (2003). Para responden dihadapkan pada pernyataan terkait teknologi informasi yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di UNS.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dapat ditinjau dari beberapa indikator, yaitu aktivitas dan *output* anggaran jelas, partisipasi yang tinggi dari staf dalam anggaran, pemahaman staf terhadap anggaran baik, terdapat sistem *database* yang baik, pelaporan secara berkala, serta informasi kinerja dapat bermanfaat untuk menghemat biaya, pengambilan keputusan, koordinasi antarbagian dan memperbaiki

efektivitas program (Sriharioto dan Wardhani 2012). Variabel ini diukur dengan sepuluh pernyataan dengan skala likert enam (dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju). Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan penelitian Sriharioto dan Wardhani (2012) yang telah dikembangkan dari penelitian Vian (2010) mengacu pada dimensi rencana berbasis kinerja, informasi anggaran berbasis kinerja, bukti monitoring dan pelaporan kinerja serta bukti penggunaan informasi kinerja.

E. Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memaparkan mengenai tanggapan yang diberikan responden pada kuesioner. Menurut Umar (2008:105), analisis deskriptif dapat memberikan gambaran dari konsep yang diuji secara lebih rinci. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sugiyono (2001:24) yang menyatakan bahwa statistik deskriptif berguna untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai deskripsi data karakteristik responden dan persepsi responden mengenai variabel penelitian.

2. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan valid tidaknya kuesioner. Validitas menunjukkan sejauh mana nilai atau ukuran yang

diperoleh benar-benar menyatakan hasil pengukuran atau pengamatan yang ingin diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006:49). Pengujian validitas dilakukan dengan korelasi *bivariate* yaitu melakukan tabulasi data terlebih dahulu kemudian mengukur korelasi antar setiap item pertanyaan dengan skor total. Menurut Sekaran dan Bougie (2010:158), kondisi item pertanyaan dikatakan valid jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Ketika item pertanyaan yang diuji tidak valid maka harus dihilangkan.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang ada dalam kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama (Umar, 2008:57). Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif konsisten dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Klasifikasi nilai *Cronbach's Alpha* dapat dilihat dalam tabel III.1 sebagai berikut.

Tabel III.1

Klasifikasi Nilai *Cronbach's Alpha*

Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Kesimpulan
0,80 – 1,00	reliabilitas baik
0,60 – 0,79	reliabilitas dapat diterima
< 0,60	reliabilitas buruk

Sumber: Sekaran dan Bougie, 2010:325

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menentukan apakah data yang telah terkumpul memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006:147). Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut, model regresi memenuhi asumsi normalitas (Umar, 2008:79). Selain dengan grafik, alat yang digunakan dalam pengujian normalitas data juga menggunakan *Kolmogorov-Sminorv*. Kriteria pengujian apabila $p \text{ value} > 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai $p \text{ value} < 0,05$ maka data tersebut tidak terdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2006:95). Jika terdapat korelasi kuat maka terdapat masalah multikolineritas yang harus diatasi. Untuk mengukur multikolineritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 , dapat

diartikan tidak terdapat multikolinearitas dalam data penelitian tersebut. Sedangkan jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan *VIF* > 10 , mengartikan bahwa data tersebut terjadi multikolinearitas. Menurut Umar (2008:84), untuk mengatasi terjadinya multikolineritas, dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melakukan evaluasi atas pengisian data, menambah jumlah data, membuang salah satu variabel independen karena data dari variabel tersebut mirip dengan variabel independen yang lain serta menggunakan metode analisis lanjutan.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antardata yang ada pada variabel-variabel penelitian. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada tabel III.2 berikut ini.

Tabel III.2

Kriteria Pengujian Autokorelasi

Hipotesis Nol	Jika	Keputusan
Tidak ada autokorelasi positif	$0 < d_w < d_L$	Tolak
Tidak ada autokorelasi positif	$d_L < d_w < d_u$	Tidak ada keputusan
Tidak ada autokorelasi negatif	$4 - d_L < d_w < 4$	Tolak
Tidak ada autokorelasi negatif	$4 - d_u < d_w < 4 - d_L$	Tidak ada keputusan
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	$d_u < d_w < 4 - d_u$	Tidak ditolak

Sumber: Ghozali, 2006:100

d. Uji Heteroskedastisitas

Heterosdastisitas berarti terdapat ketidaksamaan varian dalam model regresi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui apakah suatu model regresi terdapat heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot*. Titik-titik yang terbentuk pada grafik *scatterplot* harus menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2006:126).

4. Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji asumsi klasik, maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan kerangka teoritis dan pengajuan hipotesis dalam penelitian, maka uji hipotesis dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 17.0. Koefisien regresi diperoleh dari hasil regresi yang ditunjukkan oleh *output*. Koefisien tiap regresi digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + bX_5 + \varepsilon$$

$$KABK = a + PKP + ATP + KTMP + KO + TI + \varepsilon$$

Keterangan Persamaan Regresi Berganda:

KABK	=	Keberhasilan Anggaran Berbasis Kinerja
PKP	=	Peraturan dan Kualitas Peraturan
ATP	=	Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi
KTMP	=	Kompetensi Teknis dan Manajerial Pegawai
KO	=	Kapasitas Organisasi
TI	=	Teknologi Informasi
ε	=	Error

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*. Secara statistik *goodness of fit* dapat diukur dengan nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik dapat dikatakan signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2006:88). Pengukuran *goodness of fit* suatu model sebagai berikut:

a. Uji Koefisien Determinasi

Nilai dari koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependennya. Semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat yang artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali,

2006:87). *Adjusted R²* adalah determinasi yang disesuaikan, yang artinya besarnya pengaruh variabel bebas yang telah disebabkan dari pengaruh *error term* secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika jumlah variabel independen lebih dari dua, sebaiknya menggunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan yaitu *adjusted R²* dalam analisis penelitian data (Ghozali, 2006:87).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2006:88) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dengan uji statistik F dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Adapun kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).
- 2) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2006:88) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan

menggunakan *significance level* 0,05 (α -5%). Maka, kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).
- 2) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Universitas Sebelas Maret (UNS)

Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 36A Surakarta, 57126. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 52 tahun 2009, pada tanggal 26 Februari 2009 Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) resmi berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Semenjak perubahan status UNS menjadi perguruan tinggi yang menjalankan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka mulai dilakukan penerapan anggaran berbasis kinerja di UNS. Hal tersebut juga semakin memantapkan tekad seluruh pemangku jabatan di UNS untuk terus berkarya dan meningkatkan kualitas tata kelolanya demi kepentingan pembangunan pendidikan di masa mendatang.

1. Sejarah UNS

Universitas Sebelas Maret mulai resmi berdiri sejak tanggal 11 Maret 1976 dengan dasar hukum Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1976 tanggal 8 Maret 1976. Nama Universitas Sebelas Maret mengacu pada tanggal dan bulan kelahiran perguruan tinggi ini. Pada awalnya UNS terbentuk pertama kali dari gabungan lima perguruan tinggi yang ada di Surakarta. Tujuan dari penggabungan perguruan tinggi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Surakarta.

commit to user

Pada tahun 1982 nama dan singkatan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS Sebelas Maret), berubah menjadi Universitas Sebelas Maret disingkat UNS, melalui Keputusan Presiden RI No.55 tahun 1982. Setelah lima tahun melakukan konsolidasi, UNS mempersiapkan diri untuk memulai proses perkembangannya. Pembangunan secara fisik dimulai pada tahun 1980. Di bawah kepemimpinan rektor dr. Prakosa, kampus yang semula terletak di beberapa tempat disatukan dalam suatu kawasan. Lokasi tersebut adalah di daerah Ketingan, di tepi Sungai Bengawan Solo, dengan cakupan area sekitar 60 hektar. Di daerah Ketingan inilah, pembangunan kampus tahap pertama berakhir pada tahun 1985.

2. Tugas, Visi dan Misi UNS

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret, Bab 1 Pasal 2, dirumuskan bahwa tugas pokok UNS adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 2, UNS mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
- b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat.

- d. Melaksanakan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.
- e. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

Selain itu UNS memiliki visi dan misi yang diemban erat untuk senantiasa melakukan peningkatan dalam pencapaian tujuannya.

a. Visi

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat (UNS, 2010).

B. Analisis Deskriptif

1. Deskripsi Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu melalui instrumen kuesioner yang dibagikan kepada responden penelitian.

Responden dalam penelitian ini adalah ketua jurusan atau prodi S1 di UNS. Jumlah keseluruhan jurusan atau prodi S1 di UNS yang terpublikasi hingga tahun 2012 adalah 59 yang tersebar pada 9 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Sastra dan Seni Rupa (FSSR), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) serta Fakultas Hukum (FH). Akan tetapi beberapa fakultas seperti FH dan FKIP mempunyai karakteristik yang berbeda dengan fakultas lainnya. FH hanya memiliki 1 jurusan S1 yaitu Ilmu Hukum, sehingga secara struktural tidak terdapat jabatan ketua jurusan atau prodi. Sedangkan di FKIP terdapat 6 jurusan inti yaitu Pendidikan IPS, Pendidikan MIPA, Pendidikan Bahasa dan Seni, Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan, Pendidikan Teknik Kejuruan serta Pendidikan Ilmu Pendidikan. Masing-masing jurusan mencakup beberapa program studi, sehingga secara struktural terdapat ketua jurusan dan ketua prodi untuk masing-masingnya.

Kuesioner didistribusikan kepada responden baik secara langsung menemui ketua jurusan atau prodi maupun dititipkan ke bagian administrasi terkait. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan November–Desember 2012. Mengingat pertimbangan waktu penelitian dan beberapa jurusan atau prodi sulit untuk ditemui bagian administrasinya, maka kuesioner yang berhasil disebar berjumlah 50 kuesioner.

Berdasarkan total kuesioner yang disebar, sebanyak 45 kuesioner atau 90% kembali. Beberapa kuesioner tidak kembali karena kesibukan dari ketua jurusan atau prodi sehingga tidak dapat mengisi kuesioner tersebut. Semua data kuesioner yang kembali dapat diolah secara keseluruhan karena semua responden menjawab item-item pertanyaan secara lengkap tanpa ada yang terlewatkan. Hal tersebut menunjukkan partisipasi yang tinggi dari keseluruhan ketua jurusan atau prodi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sampel dan pengembalian kuesioner secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini.

Tabel IV.1
Sampel dan Pengembalian Kuesioner

Fakultas	Kuesioner yang Disebar	Kuesioner yang Kembali	Kuesioner yang Dapat Dianalisis
FE	3	3	3
FT	6	6	6
FSSR	9	8	8
FISIP	3	3	3
FMIPA	5	5	5
FK	2	1	1
FP	7	7	7
FKIP	15	12	12
Total	50	45	45
Persentase	100%	90%	90%

Sumber: data primer diolah, 2012

Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki yaitu sebanyak 34 orang atau 75,6%, sedangkan sisanya perempuan sebanyak 11 orang atau 24,4%. Karakteristik responden ditinjau dari jenis kelamin dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut ini.

Tabel IV.2
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	34	75,6%
Perempuan	11	24,4%
Total	45	100%

Sumber: data primer diolah, 2012

Berdasarkan segi usia seperti yang disajikan pada tabel IV.3, dapat terlihat bahwa usia responden mayoritas adalah lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 22 orang atau 48,9%. Kemudian yang berusia 40-50 tahun sebanyak 21 orang atau 46,7 % sisanya hanya 2 orang yang berusia kurang dari 40 tahun atau 4,4% dari keseluruhan responden penelitian.

Tabel IV.3
Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
< 40 tahun	2	4,4%
40-50 tahun	21	46,7%
> 50 tahun	22	48,9%
Total	45	100%

Sumber: data primer diolah, 2012

Jika dilihat dari pendidikan terakhir, responden dalam penelitian ini yaitu ketua jurusan atau prodi di UNS berpendidikan terakhir S2 dan S3. Secara mayoritas responden yang menjabat ketua jurusan atau prodi di UNS 60% atau 27 orang berpendidikan terakhir S2 dan 40% atau 18 orang sudah berpendidikan terakhir S3 seperti yang terlihat pada tabel IV.4.

Tabel IV.4
Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
S2	27	60%
S3	18	40%
Total	45	100%

Sumber: data primer diolah, 2012

2. Deskripsi Persepsi Responden

Persepsi responden merupakan pendapat atau pandangan responden mengenai variabel penelitian yang dapat dilihat dari kecenderungan jawaban responden pada kuesioner penelitian. Analisis ini mendeskripsikan mengenai kecenderungan pendapat para ketua jurusan atau prodi di UNS selaku responden dalam penelitian. Persepsi responden dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert 6 poin dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

a. Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Deskripsi persepsi responden sebanyak 45 orang terhadap item pernyataan keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja sebanyak 10 item pernyataan dapat dilihat pada tabel IV.5. Berdasarkan tabel tersebut jawaban responden cukup beragam. Secara mayoritas, responden cenderung memilih jawaban pada kisaran setuju-sangat setuju. Pada item pertanyaan 1 sebanyak 42,2% responden menjawab setuju dan 20% responden sangat setuju atas pernyataan aktivitas *output* dan dokumen anggaran jelas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

commit to user

sebagian besar responden dapat memahami aktivitas dan *output* yang terdapat dalam dokumen anggaran.

Sebanyak 37,8% responden menjawab setuju dan 24,4% menjawab sangat setuju pada item pernyataan 2 sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum partisipasi staf dalam proses penyusunan anggaran relatif tinggi. Selanjutnya, sebanyak 31,1% responden menyatakan setuju dan 24,4% menjawab agak setuju terhadap item pernyataan 3 bahwa pemahaman staf dalam proses penyusunan anggaran baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara umum pemahaman staf dalam proses penyusunan anggaran relatif baik tapi masih pada kisaran yang belum tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya untuk lebih bisa memahami proses penyusunan anggaran pada seluruh staf terkait.

Pada item pernyataan 4 secara mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 35,6% dan agak setuju 20% sehingga menurut pandangan responden terdapat sistem *database* yang cukup baik dalam memonitor pelaksanaan anggaran. Sedangkan pada item pernyataan 5 secara mayoritas responden menjawab setuju yaitu 55,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dan setiap tahunnya juga dilakukan pelaporan berkala mengenai penyerapan anggaran serta *review* terhadap laporan tersebut.

Berdasarkan item pernyataan 6-10 mengenai manfaat informasi kinerja, responden lebih cenderung menjawab setuju-sangat setuju (rata-rata *commit to user*)

rata hampir mencapai 80%). Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi kinerja memiliki manfaat dalam menghemat biaya, mengambil keputusan seperti estimasi sumber daya dan penyusunan strategi mendatang, meningkatkan koordinasi antara staf dan antar bagian terkait, memperbaiki efektivitas pelaksanaan program serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel IV.5
Persepsi Responden Mengenai Keberhasilan Pelaksanaan
Anggaran Berbasis Kinerja

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden					
		STS %	TS %	ATS %	AS %	S %	SS %
1.	Aktivitas dan <i>output</i> dokumen anggaran jelas	0	2,2	6,7	28,9	42,2	20
2.	Partisipasi staf dalam penyusunan anggaran tinggi	0	4,4	17,8	15,6	37,8	24,4
3.	Pemahaman staf dalam penyusunan anggaran baik	0	11,1	22,2	24,4	31,1	11,1
4.	Sistem <i>database</i> baik dalam memonitor anggaran	2,2	13,3	11,1	20	35,6	17,8
5.	Pelaporan dan review laporan penyerapan anggaran selalu dilakukan	0	0	11,1	22,2	55,6	11,1
6.	Informasi kinerja bermanfaat menghemat biaya	0	2,2	13,3	20	28,9	35,6
7.	Informasi kinerja bermanfaat pengambilan keputusan	0	0	0	24,4	42,2	33,3
8.	Informasi kinerja bermanfaat meningkatkan koordinasi	0	0	0	17,8	53,3	28,9
9.	Informasi kinerja bermanfaat dalam efektivitas program	0	0	0	13,3	46,7	40

10.	Informasi kinerja bermanfaat peningkatan kualitas pelayanan publik	0	0	4,4	8,9	44,4	42,2
-----	--	---	---	-----	-----	------	------

Sumber: data primer diolah, 2012

b. Peraturan dan Kualitas Peraturan

Deskripsi persepsi responden sebanyak 45 orang terhadap item pernyataan peraturan dan kualitas peraturan sebanyak 3 item pernyataan dapat dilihat pada tabel IV.6. Berdasarkan tabel tersebut jawaban responden cukup beragam. Secara mayoritas, responden cenderung memilih jawaban pada kisaran agak tidak setuju-agak setuju. Pada item pernyataan 11 sebanyak 33,3% responden menjawab agak setuju atas pernyataan peraturan anggaran mudah dipahami. Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran dapat dipahami tetapi masih pada kisaran yang belum terlalu baik.

Pada item pernyataan 12 mengenai hukuman atas buruknya kinerja berjalan dengan baik secara mayoritas sebanyak 35,6% responden menyatakan agak tidak setuju dan 24,4% menyatakan tidak setuju. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketika kinerja buruk maka hukuman atas buruknya kinerja tersebut belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sedangkan pada item pernyataan 13 mengenai prosedur operasional anggaran mudah diimplementasikan, sebanyak 37,8% responden menjawab agak setuju dan 24,4% menyatakan agak tidak setuju. Hal ini mengindikasikan prosedur operasional anggaran masih belum cukup mudah untuk dipahami secara lebih mendalam.

Tabel IV.6

Persepsi Responden Mengenai Peraturan dan Kualitas Peraturan

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
		%	%	%	%	%	%
11.	Peraturan anggaran mudah dipahami	0	17,8	17,8	33,3	24,4	6,7
12.	Hukuman buruknya kinerja berjalan baik	2,2	24,4	35,6	31,1	4,4	2,2
13.	Prosedur operasional anggaran mudah diimplementasikan	4,4	13,3	24,4	37,8	20	0

Sumber: data primer diolah, 2012

c. Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi

Deskripsi persepsi responden sebanyak 45 orang terhadap item pernyataan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sebanyak 6 item pernyataan dapat dilihat pada tabel IV.7. Dapat dilihat bahwa dari tabel tersebut jawaban responden cukup beragam. Secara mayoritas, responden cenderung memilih jawaban pada kisaran agak setuju-setuju. Pada item 14 sebanyak 51,1% responden menjawab setuju atas sosialisasi anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi atas aturan pelaksanaan anggaran telah dilakukan dengan cukup baik.

Secara dominan, persepsi responden mengenai pengawasan anggaran oleh masyarakat cukup baik, sebagaimana terlihat pada item pernyataan 15 sebanyak 55,6% responden cenderung memilih jawaban setuju. Sedangkan pengawasan oleh masyarakat sebagaimana terlihat pada item 16 menunjukkan mayoritas responden menjawab agak setuju, sehingga dapat dilihat bahwa masyarakat sudah ikut berpartisipasi

terhadap pengawasan pelaksanaan anggaran walaupun persentasenya masih cukup rendah.

Selain itu, setiap tahunnya juga dilakukan pemeriksaan oleh audit eksternal atau BPK terhadap pengelolaan anggaran universitas seperti yang terlihat pada item 17 bahwa audit eksternal selalu dilakukan, 68,9% responden menyatakan pendapat setuju. Sebanyak 48,9% responden menjawab setuju untuk pernyataan pada item 18 bahwa dilakukan pelaporan perencanaan kas setiap bulan. Walaupun secara mayoritas responden menyatakan demikian. Namun pada kenyataannya ada beberapa jurusan atau prodi yang tidak melakukan pelaporan perencanaan kas setiap bulan secara rutin, sebanyak 8,9% responden menjawab agak tidak setuju, 15,6% responden menjawab tidak setuju dan 2,2% menjawab sangat tidak setuju.

Demikian halnya juga dengan rekonsiliasi anggaran walaupun secara mayoritas sudah dilakukan setiap awal bulan seperti yang terlihat pada item 19 bahwa 44,4% menyatakan setuju. Akan tetapi kenyataannya masih ada yang tidak melakukan rekonsiliasi anggaran setiap awal bulan secara tepat waktu 2,2% responden menyatakan sangat tidak setuju, 13,3% tidak setuju dan 17,8% agak tidak setuju. Rekonsiliasi anggaran oleh masing-masing jurusan atau prodi merupakan salah satu bentuk partisipasi anggaran universitas secara keseluruhan.

Tabel IV.7

Persepsi Responden Mengenai Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
		%	%	%	%	%	%
14.	Sosialisasi anggaran baik	4,4	11,1	11,1	22,2	48,9	2,2
15.	Pengawasan anggaran baik	2,2	0	13,3	28,9	53,3	2,2
16.	Pengawasan oleh masyarakat baik	2,2	13,3	26,7	33,3	22,2	2,2
17.	Audit eksternal selalu dilakukan	0	0	0	15,6	68,9	15,6
18.	Pelaporan perencanaan kas setiap bulan	0	15,6	8,9	22,2	51,1	2,2
19.	Rekonsiliasi anggaran selalu dilakukan	2,2	13,3	17,8	17,8	44,4	4,4

Sumber: data primer diolah, 2012

d. Kemampuan Teknis dan Manajerial Pegawai

Deskripsi persepsi responden sebanyak 45 orang terhadap item pernyataan kemampuan teknis dan manajerial pegawai sebanyak 6 item pernyataan dapat dilihat pada tabel IV.8. Dapat dilihat bahwa dari tabel tersebut jawaban responden juga cukup beragam. Secara mayoritas, responden menjawab bahwa 42,2% setuju pada item pernyataan 20 bahwa pendidikan dan keahlian yang mereka miliki dapat memudahkan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. Akan tetapi terkait dengan penyusunan anggaran, secara umum responden merasa bahwa pendidikan dan keahlian yang mereka miliki belum dapat memudahkan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan terkait dengan proses penganggaran tersebut. Hal tersebut dikarenakan latar belakang

pendidikan yang berbeda-beda dari berbagai jurusan sehingga pemahaman mengenai anggaran belum dapat dilakukan sepenuhnya. Pada item 21 responden cenderung setuju yaitu 33,3% bahwa insentif atas prestasi kerja sudah cukup memadai. Namun demikian, sebanyak 46,6% responden menjawab sangat tidak setuju-agak tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Sebanyak 51,1% menyatakan setuju bahwa penjelasan *job description* oleh pimpinan mempermudah mereka untuk melaksanakan tugas. Setiap jurusan atau prodi dalam hal ini merupakan unsur penyusunan anggaran dari setiap fakultas terkait dan muaranya pada bagian pusat di UNS. Responden cenderung menjawab setuju 55,6% bahwa pimpinan atau atasan mereka akan bekerja *overtime* untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pada item pernyataan 24 mengenai kebanggaan menjadi bagian pelaksana anggaran responden cenderung menjawab agak setuju-setuju. Kemudian mereka juga berpandangan bahwa penjelasan visi dan misi oleh pimpinan sangat bermanfaat, 46,7% menyatakan setuju.

Tabel IV.8
Persepsi Responden Mengenai Kompetensi Teknis dan Manajerial Pegawai

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
		%	%	%	%	%	%
20.	Pendidikan dan keahlian memudahkan menyelesaikan pekerjaan	2,2	8,9	8,9	13,3	42,2	24,2

21.	Insentif memadai	4,4	22,2	20	15,6	33,3	4,4
22.	Penjelasan <i>job description</i> pimpinan mempermudah tugas	2,2	4,4	8,9	17,8	51,1	15,6
23.	Pimpinan bekerja <i>overtime</i> untuk menyelesaikan tugas	2,2	4,4	8,9	17,8	55,6	11,1
24.	Bangga menjadi bagian pelaksana anggaran	0	2,2	6,7	24,4	37,8	28,9
25.	Penjelasan visi misi bermanfaat	0	2,2	6,7	15,6	46,7	28,9

Sumber: data primer diolah, 2012

e. Kapasitas Organisasi

Deskripsi persepsi responden sebanyak 45 orang terhadap item pernyataan kapasitas organisasi sebanyak 5 item pernyataan dapat dilihat pada tabel IV.9. Jawaban responden cukup beragam. Secara mayoritas, responden menjawab setuju, baik dari segi struktur organisasi yang mendukung, prioritas program sebagai dasar pagu anggaran, kinerja pimpinan meningkatkan tanggung jawab, pimpinan dapat membangun kebersamaan staf serta pimpinan memberikan kesempatan meningkatkan kemampuan intelektual. Jawaban responden dari item pernyataan ini adalah lebih dari 50% menjawab setuju.

Tabel IV.9

Persepsi Responden Mengenai Kapasitas Organisasi

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden					
		ST	TS	ATS	AS	S	SS
		S					
		%	%	%	%	%	%
26.	Struktur organisasi mendukung	0	6,7	8,9	24,4	53,3	6,7
27.	Prioritas program kerja menjadi dasar pagu anggaran	0	2,2	2,2	24,4	51,1	20

28.	Kinerja pimpinan meningkatkan tanggung jawab	0	0	11,1	15,6	60	13,3
29.	Pimpinan dapat membangun kebersamaan staf	0	0	4,4	22,2	57,8	15,6
30.	Pimpinan memberikan kesempatan meningkatkan kemampuan intelektual	0	0	0	15,6	55,6	28,9

Sumber: data primer diolah, 2012

f. Teknologi Informasi

Deskripsi persepsi responden sebanyak 45 orang terhadap item pernyataan teknologi informasi sebanyak 3 item pernyataan dapat dilihat pada tabel IV.10. Dapat dilihat bahwa dari tabel tersebut secara umum responden setuju bahwa UNS telah melakukan perubahan teknologi untuk mendukung anggaran sebanyak 48,9 setuju terhadap pernyataan ini. Kemudian 46,7% setuju bahwa telah digunakan aplikasi terkait anggaran dan 33,3% setuju bahwa aplikasi tersebut mempermudah dalam pelaporan anggaran.

Tabel IV.10

Persepsi Responden Mengenai Keberhasilan Teknologi Informasi

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
		%	%	%	%	%	%
31.	Perubahan teknologi informasi untuk mendukung anggaran	0	8,9	4,4	20	51,1	15,6
32.	Menggunakan aplikasi terkait anggaran	2,2	4,4	2,2	26,7	48,9	15,6
33.	Aplikasi memudahkan pelaporan anggaran	2,2	8,9	6,7	31,3	33,3	17,8

Sumber: data primer diolah, 2012

commit to user

C. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengujian validitas untuk mengukur valid tidaknya instrumen penelitian. Pengujian validitas dilakukan menggunakan korelasi *bivariate* dengan mengkorelasikan skor setiap item pertanyaan dengan total skor item pertanyaan variabel terkait. Hasil uji validitas kuesioner dapat dilihat pada tabel IV.11 berikut ini.

Tabel IV.11
Hasil Uji Validitas Kuesioner

Variabel	Item Pertanyaan	Nilai Signifikansi	Kesimpulan
Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja	KABK1	0,000	Valid
	KABK2	0,000	Valid
	KABK3	0,000	Valid
	KABK4	0,000	Valid
	KABK5	0,000	Valid
	KABK6	0,000	Valid
	KABK7	0,000	Valid
	KABK8	0,000	Valid
	KABK9	0,000	Valid
	KABK10	0,000	Valid
Peraturan dan Kualitas Peraturan	PKP1	0,000	Valid
	PKP2	0,000	Valid
	PKP3	0,000	Valid
Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi	ATP1	0,000	Valid
	ATP2	0,000	Valid
	ATP3	0,000	Valid
	ATP4	0,001	Valid
	ATP5	0,000	Valid
	ATP6	0,000	Valid
Kemampuan Teknis dan Manajerial Pegawai	KTMP1	0,000	Valid
	KTMP2	0,000	Valid
	KTMP3	0,000	Valid
	KTMP4	0,000	Valid

	KTMP5	0,000	Valid
	KTMP6	0,000	Valid
Kapasitas Organisasi	KO1	0,000	Valid
	KO2	0,000	Valid
	KO3	0,000	Valid
	KO4	0,000	Valid
	KO5	0,002	Valid
Teknologi Informasi	TI1	0,000	Valid
	TI2	0,000	Valid
	TI3	0,000	Valid

Sumber: data primer diolah, 2012

Tabel IV.11 tersebut menunjukkan tingkat validitas dari setiap item pertanyaan dalam kuesioner. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa keseluruhan item pertanyaan telah memenuhi syarat validitas dengan nilai signifikansi $<0,05$ sehingga keseluruhan item pertanyaan pada kuesioner penelitian dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Instrumen penelitian juga diuji tingkat reliabilitasnya agar dapat diketahui bahwa kuesioner dapat mengindikasikan konsistensi pengukuran. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach's Alpha*. Hasil uji reliabilitas keseluruhan variabel penelitian dapat dilihat pada tabel IV.12.

Tabel IV.12

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Keberhasilan Pelaksanaan ABK	0,887	Reliabel
Peraturan dan Kualitas Peraturan	0,793	Reliabel
Akuntabilitas, Partisipasi dan Transparansi	0,811	Reliabel

Kemampuan Teknis dan Manajerial Pegawai	0,839	Reliabel
Kapasitas Organisasi	0,780	Reliabel
Teknologi Informasi	0,894	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2012

Berdasarkan uji reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* semua variabel menunjukkan $>0,60$. Secara lebih rinci variabel Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja; Akuntabilitas, Partisipasi dan Transparansi; Kemampuan Teknis dan Manajerial Pegawai serta Teknologi Informasi memiliki kisaran nilai *Cronbach's Alpha* 0,80-1,00 sehingga masuk ke dalam kategori reliabilitas baik. Sedangkan variabel Peraturan dan Kualitas Peraturan serta Kapasitas Organisasi memiliki kisaran nilai *Cronbach's Alpha* 0,60-0,79 sehingga masuk ke dalam kategori reliabilitas dapat diterima. Kesimpulannya bahwa semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel atau handal.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, yaitu membandingkan nilai p value dengan tingkat signifikansi 5%. Jika p value $> 5\%$ maka data berdistribusi normal. Selain itu, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan metode grafik yakni melihat histogram dan *scatterplot* data. Hasil uji *Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat pada tabel IV.13.

Tabel IV.13
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov Smirnov	p value	Kesimpulan
Unstandardized Residual	0,807	0,533	Distribusi Normal

Sumber: data primer diolah, 2012

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai residual persamaan regresi menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* 0,807 dengan p value 0,533 lebih besar dari 0,05 sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *VIF* pada data pengujian. Hasil uji multikolineritas dapat dilihat pada tabel IV.14 berikut ini.

Tabel IV.14
Hasil Uji Multikolineritas

Variabel bebas	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
PKP	0,455	2,197	Non multikolineritas
ATP	0,303	3,302	Non multikolineritas
KTMP	0,210	4,760	Non multikolineritas
KO	0,366	2,734	Non multikolineritas
TI	0,684	1,463	Non multikolineritas

Sumber: data primer diolah, 2012

Hasil perhitungan nilai *tolerance* dari model regresi menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 (10%). Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai *VIF* lebih dari 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin Watson*. Jumlah variabel independen adalah sebanyak 5 variabel dengan total sampel penelitian sebanyak 45 responden. Dengan demikian, pada $k = 5$ dan $n = 45$ serta $\alpha = 5\%$, diperoleh nilai kritis dari persamaan model adalah sebagai berikut:

Nilai $d_L = 1,2874$ dan $4 - d_L = 2,7126$

Nilai $d_u = 1,7762$ dan $4 - d_u = 2,2238$

Hasil perhitungan dengan SPSS 17.0 diperoleh nilai statistik *Durbin-Watson* seperti yang terlihat pada tabel IV.15 berikut ini.

Tabel IV.15
Hasil Uji Autokorelasi

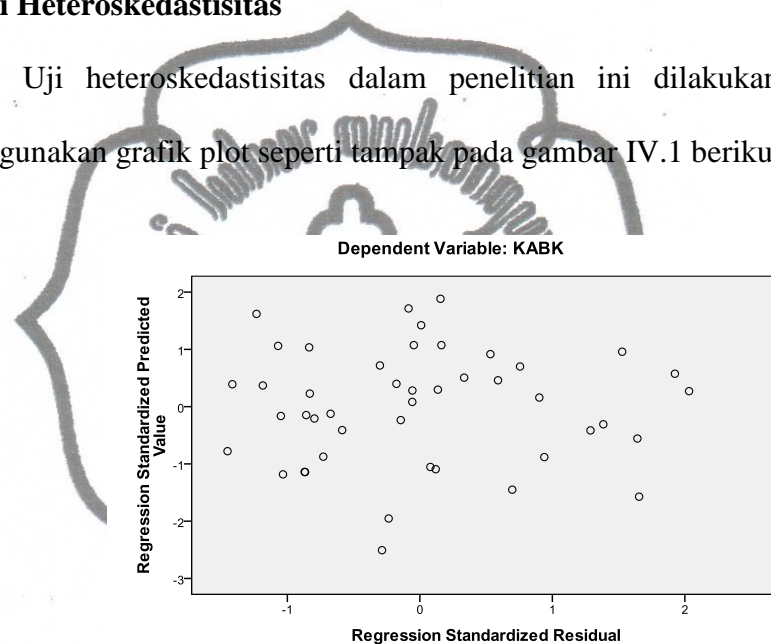
Model	<i>Durbin-Watson</i>	<i>Daerah Uji</i>
1	2,217	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: data primer diolah, 2012

Tabel IV.15 menunjukkan nilai uji *Durbin-Watson* pada model persamaan regresi berada pada daerah $d_u < d < 4 - d_u$ ($1,7762 < 2,217 < 2,2238$). Dengan demikian, tidak ada autokorelasi negatif maupun positif pada model regresi penelitian ini.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik plot seperti tampak pada gambar IV.1 berikut ini.



Gambar IV.1 *Scatterplot* Uji Heteroskedastisitas

Model regresi linier yang baik adalah yang homogenitas yaitu kesamaan variansi dari satu residual ke residual berikutnya. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik pada grafik membentuk pola tertentu maka mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik yang terdapat pada grafik tidak

membentuk pola teratur yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, melainkan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, model regresi ini adalah homoskedastisitas.

E. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam persamaan regresi. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang menggunakan lebih dari dua variabel independen. Oleh karena itu, analisis determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai *adjusted R²* untuk menghindari bias pada variabel independen. *Adjusted R²* merupakan determinasi yang disesuaikan. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel IV.16.

Tabel IV.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,740 ^a	0,547	0,489	4.816

Sumber: data primer diolah, 2012

Berdasarkan tabel IV.16 nilai *Adjusted R²* adalah 0,489, artinya implementasi prinsip-prinsip *good university governance* mempengaruhi

keberhasilan anggaran berbasis kinerja sebesar 48,9% sedangkan sisanya 51,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F penelitian ini ditunjukkan pada tabel IV.17.

Tabel IV.17
Hasil Uji F

Model	<i>Sum of Squares</i>	df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1 Regression	1092,687	5	218,537	9,423	0,000 ^a
Residual	904,513	39	23,193		
Total	1997,200	44			

Sumber: data primer diolah, 2012

Berdasarkan tabel uji F di atas dapat dilihat nilai F hitung sebesar 9,423 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut $< 0,05$ maka hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Variabel independen yaitu peraturan dan kualitas peraturan; akuntabilitas, transparansi dan partisipasi; kemampuan teknis dan manajerial pegawai; kapasitas organisasi serta teknologi informasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

commit to user

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji signifikansi parameter individual atau uji t dimaksudkan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis penelitian. Hasil pengujian hipotesis dengan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) dapat dilihat pada tabel IV.18 sebagai berikut.

Tabel IV.18

Hasil Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	T	Signifikansi
Konstanta	13,464	2,200	0,034
PKP	0,259	0,666	0,509
ATP	0,104	0,380	0,706
KTMP	0,339	1,102	0,277
KO	0,213	0,535	0,595
TI	1,077	3,826	0,000

Sumber: data primer diolah, 2012

Hasil uji regresi berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel IV.18 di atas. Persamaan regresi yang diperoleh $Y = 13,464 + 0,259X_1 + 0,104X_2 + 0,339X_3 + 0,213X_4 + 1,077X_5 + \varepsilon$. Berdasarkan hasil olah data, dapat dilihat bahwa variabel peraturan dan kualitas peraturan; akuntabilitas, transparansi dan partisipasi; kemampuan teknis dan manajerial pegawai serta kapasitas organisasi memiliki nilai signifikansi $>0,05$. Oleh karena itu untuk keempat variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Sedangkan variabel teknologi informasi memiliki nilai

commit to user

signifikansi $<0,05$ sehingga berpengaruh signifikan terhadap variabel keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja

F. Pembahasan

Penerapan prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja di perguruan tinggi menjadi sebuah hal yang penting untuk menegakkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Penelitian ini mencoba memberikan bukti empiris mengenai hal tersebut. Dalam konteks keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang digambarkan oleh responden harus dimaknai dengan mempertimbangkan bahwa persepsi responden harus dipahami dalam konteks masa perkembangan pengimplemetasian anggaran berbasis kinerja di UNS.

1. Pengaruh Peraturan dan Kualitas Peraturan terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa peraturan dan kualitas peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel ini adalah 0,509 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga hipotesis pertama ditolak. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sriharioto dan Wardhani (2012) yang membuktikan bahwa peraturan dan kualitas peraturan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja satker K/L.

Peneliti menduga bahwa peraturan dan kualitas peraturan terkait dengan mekanisme anggaran di UNS masih belum dapat dipahami dan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat pada persepsi responden mengenai indikator peraturan dan kualitas peraturan yaitu kemudahan implementasi dan pemahaman prosedur operasional anggaran serta mekanisme *reward and punishment* secara umum masih belum sepenuhnya menunjukkan angka persetujuan yang tinggi. Hanya 20% responden yang mengindikasikan bahwa implementasi prosedur operasional anggaran mudah dilakukan. Ketika peraturan dianggap belum jelas, tegas, mudah dipahami dan diimplementasikan maka akan menjadi kendala dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Pamungkas (2009) dalam penelitiannya mengenai implementasi anggaran berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan bahwa peraturan dapat menjadi kendala yuridis ketika peraturan tersebut secara normatif ada tetapi belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel ini adalah 0,706 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga hipotesis kedua ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sriharioto

dan Wardhani (2012) yang juga belum berhasil membuktikan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Melawati (2011) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dengan kinerja. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam penelitian ini tidak hanya menguji variabel akuntabilitas secara terpisah tetapi secara bersama-sama menjadi satu variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Idealnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi merupakan prinsip yang harus diterapkan secara sejalan untuk mencapai mekanisme anggaran yang optimal.

Menurut Sriharioto dan Wardhani (2012) alasan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan anggaran berbasis kinerja adalah terkait dengan sosialisasi anggaran belum optimal dilakukan dan hukuman atas keterlambatan rekonsiliasi anggaran tidak tegas. Akibatnya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tidak optimal. Sedangkan peneliti menduga bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan dengan keberhasilan anggaran berbasis kinerja karena jika dilihat dari segi partisipasi beberapa jurusan atau prodi tidak tepat waktu dalam perencanaan dan rekonsiliasi anggaran. Ketika dari unsur jurusan atau prodi mengalami keterlambatan dalam pengajuan anggaran maka akan berpengaruh pada anggaran UNS secara keseluruhan.

Menurut penelitian Ramadhani (2011) yang meneliti persepsi *stakeholder internal* terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan UNS pasca ditetapkan sebagai BLU menunjukkan bahwa persepsi tingkat kepuasan *stakeholder internal* terhadap akuntabilitas laporan keuangan UNS pasca ditetapkan sebagai BLU adalah pada kondisi sedang atau biasa saja. Sedangkan dari segi transparansi menemukan bahwa masih pada tingkatan rendah.

3. Pengaruh Kemampuan Teknis dan Manajerial Pegawai terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa kemampuan teknis dan manajerial pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel ini adalah 0,277 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga hipotesis ketiga ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sriharioto dan Wardhani (2012) yang juga belum berhasil membuktikan bahwa kemampuan teknis dan manajerial pegawai berpengaruh positif terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Melawati (2011) bahwa kapasitas aparatur terkait dengan kompetensi pegawai berpengaruh positif dengan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal tersebut dikarenakan lingkup yang berbeda pada penelitian ini.

Menurut Sriharioto dan Wardhani (2012) alasan kemampuan teknis dan manajerial pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja adalah terkait dengan kurangnya kompetensi teknis pegawai, pemberian insentif dan komitmen pimpinan mengakibatkan rendahnya produktifitas pegawai sehingga mempengaruhi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Hal-hal tersebut dapat menjadi kendala yang cukup berarti dalam keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan peneliti menduga bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan dengan keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja karena latar belakang pendidikan yang berbeda-beda yakni tidak memiliki *background* akuntansi menyebabkan kesulitan dalam melakukan penyusunan anggaran. Anggaran sangat terkait dengan perencanaan keuangan, ketika pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran kurang memahami dasar anggaran serta aspek akuntansi terkait akan menyebabkan proses penyusunan anggaran yang tidak optimal (Widyantoro, 2009).

4. Pengaruh Kapasitas Organisasi terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa kapasitas organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel ini adalah 0,595 yang lebih besar dari

nilai signifikansi 0,05 sehingga hipotesis keempat ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sriharioto dan Wardhani (2012) yang juga belum berhasil membuktikan bahwa kapasitas organisasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Suaib (2008) yang menemukan bahwa kapasitas organisasi yang dilihat dari struktur organisasi berpengaruh positif dengan kinerja organisasi. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian tersebut hanya memfokuskan struktur organisasi saja dalam menilai kapasitas organisasi.

Menurut Sriharioto dan Wardhani (2012) alasan kapasitas organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan anggaran berbasis kinerja adalah terkait dengan kurangnya dukungan organisasi dan manajerial untuk memberikan kesempatan pegawai mengembangkan kemampuan sehingga menurunkan rasa tanggung jawab pegawai.

Sedangkan peneliti menduga bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan dengan keberhasilan anggaran berbasis kinerja karena secara struktural memang kapasitas organisasi sudah memadai tetapi secara fungsional masih belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ketika kapasitas organisasi masih kurang memadai maka diindikasikan kinerja yang dicapai relatif rendah. Menurut penelitian Durachman (2005) dalam penelitiannya menemukan bahwa komponen Rencana Anggaran Satuan Kerta (RASK) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang merupakan salah satu

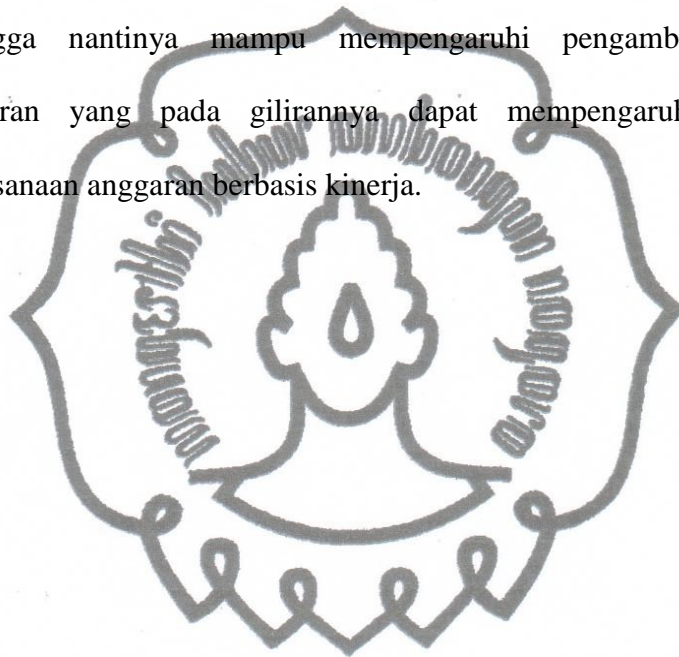
indikator kapasitas organisasi belum sesuai dengan prioritas program yang tercantum dalam renstra sehingga menyebabkan rendahnya kinerja.

5. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Pengujian hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel ini adalah 0,000 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 sehingga hipotesis kelima diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sriharioto dan Wardhani (2012) yang juga berhasil membuktikan secara empiris bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Jumaili (2005) yang mengemukakan bahwa teknologi informasi akan menghasilkan *output* yang semakin baik dan kinerja yang meningkat. Sedangkan menurut Sriharioto dan Wardhani (2012) perubahan sistem teknologi informasi yang baru akan meningkatkan performa satker.

Berdasarkan analisis data mengindikasikan bahwa secara keseluruhan perkembangan keberhasilan anggaran berbasis kinerja pada UNS saat ini belum sepenuhnya menyentuh seluruh prinsip-prinsip *good university governance*. Keberhasilan anggaran berbasis kinerja lebih dijelaskan oleh dukungan teknologi informasi dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya. Terkait prinsip-prinsip *good university governance*

yang belum cukup menjelaskan keberhasilan anggaran berbasis kinerja. Hal tersebut dikarenakan pengimplementasiannya masih berada pada tahap perkembangan di setiap bagian universitas. Untuk mencapai keberhasilan yang seutuhnya masih diperlukan waktu yang cukup panjang dan banyak perbaikan pada implementasi prinsip-prinsip *good university governance* sehingga nantinya mampu mempengaruhi pengambilan keputusan anggaran yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji secara empiris implementasi prinsip-prinsip *good university governance* terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan dan kualitas peraturan; akuntabilitas, transparansi dan partisipasi; kemampuan teknis dan manajerial pegawai; dan kapasitas organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Sedangkan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Implementasi prinsip-prinsip *good university governance* secara keseluruhan masih belum cukup menjelaskan keberhasilan anggaran berbasis kinerja di UNS, dikarenakan pengimplementasian masih berada pada tahap perkembangan di setiap bagian universitas sehingga masih diperlukan proses perbaikan untuk menuju *good university governance*.

B. KETERBATASAN

Penelitian ini mengandung keterbatasan sebagai berikut:

1. Pengukuran prinsip-prinsip *good university governance* yang menjadi variabel independen pada penelitian ini hanya menggunakan lima prinsip *commit to user*

berdasarkan pada OECD yaitu peraturan dan kualitas peraturan; akuntabilitas, partisipasi dan transparansi; kemampuan teknis dan manajerial pegawai; kapasitas organisasi; dan teknologi informasi.

2. Penelitian ini dilakukan di Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan sampel penelitian hanya Ketua Jurusan dan Program Studi S1 dan belum melibatkan unsur-unsur Fakultas lainnya seperti Ketua Program Studi D3, S2 dan S3 serta Biro-Biro yang ada di lingkungan UNS sebagai responden penelitian.

C. SARAN

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran prinsip-prinsip *good university governance* yang lebih beragam, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan lebih banyak responden yaitu tidak hanya Ketua Jurusan dan Program Studi S1 tetapi juga berasal dari berbagai unsur Fakultas (Ketua Program Studi D3, S2 dan S3) serta Biro yang ada di universitas yang juga terlibat dalam proses penganggaran, sehingga hasil penelitian menunjukkan data yang lebih berwarna.